

Membangun Kota di Atas Hutan

Abhijan Toto dan Pujita Guha
untuk *The Forest Curriculum*

1. Pengantar

“Forest City” merupakan sebuah megaproyek kota pintar, dibangun langsung di lepas pantai Johor, Malaysia. Sebuah usaha gabungan antara Country Garden Group, Tiongkok dan Esplanade Danga 88 Sdn Bhd (EDSB)¹ yang didukung Pemerintah Malaysia, Country Garden Group, Pacificview Sdn Bhd’s. Forest City berada di *Iskandar Special Economic Zone* (SEZ) atau ‘Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Iskandar’, menjorok ke Selat Johor yang menghubungkan Singapura dan Malaysia. Kota ini dimaksudkan untuk menarik orang kaya Singapura yang bisa membeli properti atau berkendara untuk bersenang-senang pada akhir pekan; investor Tiongkok yang ingin memiliki properti selain di Tiongkok; dan orang Malaysia yang mendapatkan keuntungan dari pekerjaan ekstraktif seperti real estate, minyak, atau bahkan minyak sawit. Dibangun di atas empat pulau reklamasi yang saling berhubungan dan membentang sepanjang 30 km² di jantung alam semesta ASEAN, lokasi strategis Forest City juga telah diperhitungkan oleh pemiliknya dari sudut pandang global. Forest City adalah enam jam penerbangan ke Tiongkok (atau India), sehingga dapat diakses oleh 15 negara APEC. Forest City juga akan terkoneksi dengan jaringan maskapai penerbangan ASEAN. Namun, mungkin saja janji Forest City di media tumbuh subur pada hubungan antara kata “hutan” dan “kota”—proyek yang disebut-sebut sebagai bentangan perkotaan “futuristik cerdas dan hijau”. Lihatlah gambar simulasi Forest City mana pun dan yang terlihat seperti “Taman Gantung” Nebukadnezar, dengan pohon yang ditanam, semak belukar, menonjol dari setiap inci beton yang tersedia. Kota ini juga dimaksudkan untuk menampung hutan tropis yang “dirancang” di jantungnya. Elemen hijau di Forest City bersifat material dan metaforis. Material, karena setiap inci lanskap kota ditutupi dengan tumbuhan, dan metaforis dalam arti karbon/emisi netral. Kota ini memobilisasi konsep perencanaan kota yang berlapis-lapis. Dilapisi dengan kendaraan dan ruang parkir yang tersembunyi di bawah tanah, sementara lapisan atas dibuat dapat dinavigasi melalui sistem rel ringan yang luas, menjadikannya ranah publik yang sepenuhnya bebas mobil. Seperti jutaan kisah *greenwashing* lainnya, proyeksi kehijauan Forest City hanya menyembunyikan akarnya dalam kapitalisme ekstraktif. Ranah bebas transportasi umum yang berharga itu terbuat dari baja, krom, dan kayu, dibakar dengan batu bara dan oleh tenaga kerja yang diminta dari tempat lain. Mungkinkah ada kehijauan perkotaan seperti ini tanpa mengenali materialitas eksploitatifnya, kisah aslinya yang tersembunyi? Bahkan kecerdasan yang sangat dibanggakan dari kota pintar tumbuh subur dalam mengekstraksi data pengguna, pada tenaga kerja yang menjalankan sistem seperti itu. Forest City mengandalkan strategi analisis data *real-time* dari infrastruktur publiknya, dengan nomor ID pengguna unik yang menghubungkan pengguna ke semua infrastruktur perkotaan, dan pengawasan sepanjang waktu terhadap ruang publik. Kota pintar dengan sendirinya merupakan sejarah pengoptimalan dan kontrol itu sendiri. Namun, sekarang dengan adanya Forest City, lanskap sensor, layar, dan analitik data tersamarkan oleh kanopi tinggi, semak-semak, dan atap tropis yang luas berlapis lilin.²

2
Untuk informasi lebih lanjut tentang politik dan puisi di Forest City, baca karya indah Daniel A. Barber, Erin Putalik, “Forest, Tower, City: Rethinking the Green Machine Aesthetic,” *Majalah Desain Harvard, Edisi Khusus Into the Woods*, 2018 (<http://www.harvarddesignmagazine.org/issues/45/forest-tower-city-rethinking-the-green-machine-aesthetic>).

3
Brian Larkin, “Politics and Poetics of Infrastructure,” *Annual Review of Anthropology*, Vol. 42: 327-343.

1
Semua informasi pengantar sudah dikumpulkan dari beranda Forest City, terutama tajuk “About Us” dan “Smart and Green” di situs web. Kunjungi di sini: <https://www.forestcitygpn.com/>

Megaproyek urban seperti Forest City, telah menjadi tolok ukur yang kita gunakan saat memikirkan soal infrastruktur. Infrastruktur seperti rel, pipa, serat optik telekomunikasi, jalan, dan truk adalah sistem yang menggerakkan umat manusia, dan materi³, di antara area teknologi

yang terus berkembang. Dalam pengalaman kita sehari-hari, infrastruktur adalah lingkungan, di mana infrastruktur tidak hanya membentuk dan mengontrol lingkungan kita (lebih lanjut tentang ini nanti), tetapi juga merasuk ke dalam semua aspek kehidupan kita, lebih sering tak pernah surut dari kesadaran kita. Kisah-kisah Forest City seperti itu berbicara tentang sejarah infrastruktur dan megaprojek yang tidak ditulis dalam kisah pertumbuhan, nilai, dan akumulasi properti, tetapi melalui narasi tentang dokumen yang hilang, reklamasi menjadi kacau, masalah keuangan dan politik (Anda bisa menyebutnya sebagai penipuan jika mau) sejarah ekstraksi, dan bagaimana kapital menghancurkan dunia di sini dan di tempat lain. Narasi semacam itu bukanlah janji, tetapi kehancuran, proyek-proyek yang runtuh sejak lahir, dari asalnya.⁴

4

Narasi kami tentang penangguhan dan penghentian dengan Forest City pantas mendapatkan satu penafian penting. Banyak narasi kontemporer tentang proyek infrastruktur Tiongkok yang gagal dan ditangguhkan ditulis dari sudut pandang Amerika yang sering merendahkan nilai proyek Tiongkok sebagai proyek yang jelek, biasa-biasa saja, dan penuh lubang dan celah. Forest City jauh dari biasa-biasa saja, atau jelek, dan reputasi pasar Country Garden sendiri berbicara sebaliknya. Dalam pekerjaan ini, kami berdua melihat contoh di mana proyek menghadapi saat-saat penangguhan (baik dengan izin atau penipuan paspor), tetapi kami juga ingin membuka proyek yang ditangguhkan dan menguraikan semua pelanggaran. Lebih lanjut tentang bagaimana politik berbicara tentang infrastruktur Tiongkok yang biasa-biasa saja, baca Laleh Khalili, "Growing Pains", London Review of Books, Vol. 43, No. 6, 18 Maret 2021 (<https://lrb.co.uk/the-paper/v43/n06/laleh-khalili/growing-pains>).

5

Tekla Aslanishvili dan Orit Halpern, "Scenes from a Reclamation," *E-Flux Architecture* (<https://www.e-flux.com/architecture/new-silk-roads/313102/scenes-from-a-reclamation/>).

6

Ibid.

2. Politik di atas/bawah tanah?

Bagaimana rasanya membangun kota di atas hutan? Bukan di dalam, tetapi di atas.

Sebuah pengingat bahwa proposisi seperti itu tertambat pada tempatnya dan dikodekan dalam bahasa.

Salah satu kata paling aneh yang beredar dalam bahasa infrastruktur adalah "reklamasi". Reklamasi mengacu pada praktik pemberian tanah baru atau tanah tak berguna tetapi bernilai, seringkali bukan hanya melalui penyediaan sumber daya seperti air, tenaga kerja, dan lain-lain, melainkan juga merebut atau mendapatkan kembali kendali atas nilai budaya atau kebanggaan.⁵ Reklamasi adalah perebutan kedaulatan, baik atau buruk, untuk "mengekklaim kembali" yang sudah ada. Forest City tetap terjatuh dalam berbagai klaim reklamasi, dengan Malaysia, Singapura, Tiongkok, dan Hong Kong, semuanya mengklaim keempat pulau ini. Namun, geopolitik seperti itu berbicara tentang relevansi geologi itu sendiri. Mungkinkah proyek itu bernilai ekonomi, jika tidak berlokasi strategis di laut, dekat dengan perairan perdagangan, peti kemas, kapal, pelabuhan, dan Singapura? Nilai Forest City berasal dari lokasinya yang strategis, dimungkinkan hanya dengan tanah reklamasi. Johor memiliki banyak tanah tak berguna terbuka atau pedalaman yang tidak terpakai, tetapi reklamasi telah membuka ruang baru ke laut, memberikan nilai lebih karena kedekatannya dengan Singapura. Nilai geopolitik Forest City berasal dari rekayasa iklim tanahnya, dan manipulasinya atas konstruksi geologis di sekitar area tersebut.

Reklamasi terutama mengacu pada praktik mencangkok tanah, tetapi dalam banyak kasus reklamasi adalah munculnya tanah hasil rekayasa manusia (atau antropogenik) di/oleh/di dalam/dari laut. Reklamasi kemudian menjadi ramalan dari kebaruan yang dibangun di atas manuver geologi, suatu tempat untuk menghabiskan waktu senggang dan tempat tinggal, posisi dan kesempatan baru, permukiman baru yang menjerok ke formasi tanah yang lebih dulu ada.⁶ Reklamasi adalah situs bangunan dunia spekulatif yang erat kaitannya dengan kapital atau modal.

Nomenklatur teknis apa yang dapat kita gunakan untuk bangunan dunia yang berhubungan dengan tanah reklamasi? Memahat, membentuk (tanah), mencetak, mengukir? Semua pernyataan ini mungkin benar dalam kasus reklamasi, tetapi saat

7

Serina Rehman, "Trends in South-east Asia: Johor's Forest City Faces Critical Challenges," ISEAS Yushof Ishak Institute, no. 3, 2017, hlm. 22. Untuk informasi lebih lanjut tentang pasir, otoritas pelabuhan dan bagaimana rantai pasokan global mengembangkan taktik mereka sendiri seputar pasir, silakan ikuti Center for Research Architecture, FutureLand: Stories from the Global Supply Chain, Center for Research Architecture: Goldsmiths University of London, 2017-2018 (<https://logistic-nightmaresite.files.wordpress.com/2018/08/futureland-reader1.pdf>).

8

Ibid, hlm. 16.

9

Williams, hlm. 4.

10

Bahkan saat kami menulis artikel ini, banjir besar dan tanah longsor sedang berlangsung di Uttarakhand, salah satu provinsi utama yang berbatasan dengan kaki Pegunungan Himalaya. Ketika para pencinta lingkungan menunjukkan bagaimana tanah longsor ini terjadi karena proyek pembangunan atau infrastruktur yang seringkali tidak memiliki izin pemerintah, kami tidak bisa tidak membantu menyoroti fakta bahwa baru-baru ini pemerintah pusat melakukan amandemen terhadap Undang-Und

dang Lingkungan, mengizinkan proyek tanpa izin, tetapi telah dimulai, untuk memiliki izin *post factum*. Ini berarti bahwa proyek yang telah dimulai tidak dapat dibatalkan, dan izin dibersihkan hanya sebagai formalitas dokumen. Untuk mengetahui lebih banyak tentang kejadian baru-baru ini, baca Mayank Aggarwal, "Pemerintah mendorong izin lingkungan *post facto* sementara pengadilan puncak tidak menyetujui," Mongabay, 6 April 2020; Tarini Mehta, "Legalizing Illegality: Post-Facto Environment Clearance," Deccan Herald, Sept 24, 2020 (<https://www.deccanherald.com/opinion/panorama/legalising-illegality-post-facto-environmental-clearances-892099.html>). Sementara Forest City secara teknis memiliki izin lingkungan, fakta bahwa pemerintah yang berkepentingan, termasuk Singapura, menunjukkan berapa banyak izin yang diberikan kepada proyek melanggar undang-undang lingkungan, fungsi, dan homeostatis, menunjukkan sejarah yang lebih besar tentang bagaimana izin lingkungan menjadi cara di mana ilegalitas dilewatkan, bukan sebagai cara untuk mengontrol atau membatasinya.

11

Rehman, hlm. 22; Williams, hlm. 9.

kita membangun dan memahat tanah sesuai keinginan kita, kita juga harus ingat bahwa tanah yang direklamasi seringkali merupakan tabula rasa; situs atau kanvas kosong, dan di atasnya kita memproyeksikan hasrat untuk merekayasa.

Akan tetapi, apa yang disembunyikan oleh reklamasi adalah saudara serangkainya—redistribusi? *Redistribusi adalah kalibrasi ulang—penye-larasan kembali titik-titik tekanan dan intensitas.* Dalam *Belt and Road Initiative* (BRI), sebuah program yang dicanangkan Tiongkok, ini sama artinya dengan redistribusi pasir di sepanjang rantai pasokan logistik dengan truk-truk yang mengambil pasir secara berlebihan di Teluk Ramunia (150 kilometer dari darat dan dari laut), untuk tumbuh di pulau-pulau hijau yang berdaulat ini.⁷

Pasir kemudian dibuang ke dasar laut lumpur yang rapuh. Jika "dibuang" terdengar kasar, kita bisa sebut dengan "disingkirkan dengan paksa". Dibuang memiliki kualitas proyeksi—rasa tindakan, energi, rasa menolak untuk menetap. Pasir membutuhkan waktu lama untuk mengendap dan menyatu, membutuhkan bobot (dari atas) yang akan memampatkan dan mengemasnya, perlu waktu untuk diamati, jika ada kebocoran, penurunan (penurunan permukaan tanah), dan lain-lain. Namun, itu akan memerlukan periode pematangan yang lebih besar dan lebih lama, menunda atau bahkan menanggukkan proyek, yang menyebabkan investasi dan kucuran modal tertunda. Country Garden Group, perusahaan yang bertanggung jawab atas Forest City, selama bertahun-tahun memperoleh reputasi buruk karena merampungkan proyek pada/sebelum waktunya, tetapi izin semacam itu sering kali mengesampingkan masalah keselamatan, yang terutama mencakup melewati waktu yang diperlukan untuk pasir mengendap. Pada awal tahun 2014, retakan muncul di Galeri Pertunjukan Forest City dan bangunan hotel lainnya, yang menunjukkan bahwa tanah rapuh di bawahnya tidak mengeras seiring waktu.⁸ Retakannya sedikit mengganggu, menimbulkan desas-desus di sana-sini, menunda pembangunan untuk sementara waktu, dan menimbulkan ketidakpercayaan di antara penghuninya. Namun, seiring berjalannya waktu, retakan itu terlupakan, lebih banyak pasir yang dibuang, lebih banyak laut direklamasi, dan lebih banyak daratan yang dibeton.

3. Politik Berlumpur

Segera setelah pembangunan Forest City dimulai dengan gebrakan, Singapura turun tangan, menyerukan kepada pemerintah Johor karena mengabaikan banyak izin lingkungan.⁹ Nah, seperti kita ketahui, dalam sejarah megaprojek infrastruktur, laporan dan kelonggarannya disesuaikan/dimodulasi/disesuaikan dengan selera setelahnya.¹⁰ Sebuah dunia berisi dokumen *post factum*.

Laporan lingkungan asing di Forest City mengklaim bahwa proyek tersebut tidak hanya mereklamasi lahan. Proyek itu juga mendistribusikan kembali garis pantai pesisir. Proyek itu tampak melampaui, di atas, dan berdekatan dengan padang lamun Tanjung Kupang, mengubah lanskap hijau intertidal.¹¹

Padang lamun yang dulu pernah berada di tempat Forest City sekarang bersandar, ditutupi pasir reklamasi dan kini hanya menjadi lumpur menggenang di daerah sebelah pulau baru. Tanpa lamun yang mengontrol dan memediasi kadar oksigen dalam air, yang tersisa adalah habitat yang menghasilkan pertumbuhan eutrofik makroalga; tanpa tumbuhan yang cukup untuk mengkonsumsinya, makroalga akan mencaplok seluruh oksigen dalam air.¹² Berlimpah, dan sulit dibasmi, makroalga ini menghasilkan kehijauan yang mengilap sendiri. Namun, lanskap yang baru dipahat seperti Forest City, seperti kota pintar mana pun, kertas-kertas di atas bentuk biologis hijau yang tidak terlalu berkilau yang ditemukan di padang lamun (di mana Forest City berdiri), di rawa-rawa bakau (yang ada di dekatnya), dan pada alga yang tumbuh di lumpur ini. Warna hijau ini mewakili semua bentuk dan sejarah hijau; sapuan hijau harfiah dari lanskap. Gambar kami tentang Forest City, dalam brosur, simulasi model, video 3D adalah tentang pembaruan pertumbuhan mekanis, dengan logam kilap berkilau, manusia dan tanaman, seolah-olah tidak ada yang bisa berkarat atau layu, seolah-olah pertumbuhan alga, lamun, atau bakau pernah ada di tengah-tengahnya.

Tanah reklamasi penuh dengan kekeruhan politik. Proses reklamasi di satu tempat menghasilkan lahan yang tidak diklaim di tempat lain. Saat Forest City menyusup ke dataran rendah, endapan lumpur, dari waktu ke waktu, mungkin akan menciptakan pulau-pulau baru berbasis lumpur. Lumpur terkonsentrasi di tambalan yang tidak rata, mengumpulkan dan memusatkan lebih banyak lumpur di sepanjang jalan. Lumpur menghasilkan lumpur. Mungkin, kisah tentang kelahiran ini menunjukkan jalan ketergantungan dan akumulasi berlapis. Sebuah kisah metafora tentang infrastruktur itu sendiri. Pelabuhan Tanjung Pelepas dibangun di atas formasi lumpur di sekitar Forest City dan sejarah padang lamun intertidal yang lebih dulu berada di sana.

4. Surplus/kelebihan:

Pada rentang tahun 2017-2019, saluran berita Qatar yang dikelola negara, Al Jazeera, menjalankan penyelidikan atas penerbitan paspor oleh negara Siprus untuk warga negara asing, di bawah skema yang memungkinkan multijutawan dan miliarder untuk mengamankan kewarganegaraan Eropa dengan imbalan keuangan yang signifikan, yaitu dengan berinvestasi di pulau itu. Perihal ini sebagian besar difasilitasi melalui pengadaan properti mahal di sepanjang tepi Pantai Siprus, sehingga warga negara asing ini memenuhi syarat untuk mendapatkan paspor Siprus. Skema ini dikritik keras oleh Komisi Eropa karena pada dasarnya “menjual” kewarganegaraan Eropa yang suci, tetapi Pemerintah Siprus membantah adanya ketidakwajaran. Namun, pada saat ini beberapa warga negara asing terkenal, termasuk Oligarki Rusia yang sedang diselidiki, pebisnis Asia, bankir Venezuela—*Politically Exposed Persons* (PEP)—aplikasi untuk paspor Siprus mereka telah disetujui. Salah seorang di antara mereka adalah Yang Huiyan, keturunan dari Country Garden Holdings (anak perusahaan dari Country Garden Group), promotor proyek Forest City. Sebuah catatan dalam situs Al Jazeera, yang kemudian dikenal sebagai *The Cyprus Papers*, tertulis sebagai berikut:¹³

13
Untuk informasi lebih lanjut, ikuti tautan di sini: “The Cyprus Papers,” Al Jazeera, <https://interactive.aljazeera.com/aje/2020/cyprus-papers/index.html>; Dokumen sumber asli dapat ditemukan di sini: <https://www.documentcloud.org/documents/7042297-ZH-06-Yang-Huiyan.html>

12
Rehman, hlm. 32.

“杨惠妍

Tahun lahir: 1981**Aplikasi disetujui:** 23.10.2018**Perkiraan kekayaan bersih:** US\$27 miliar

Info: Pengusaha miliarder dan wanita terkaya di Asia. Dia adalah pemegang saham mayoritas pengembang properti Country Garden Holdings, saham yang sebagian besar dialihkan kepadanya oleh ayahnya, Yeung Kwok Keung, pada tahun 2007. Dia juga anggota The Chinese People's Political Consultative Conference (CCPPCC), sebuah badan penasihat untuk pemerintah.

Pelamar terkait: Suami Yang, Chen Chong, juga memperoleh paspor Siprus. Dia adalah anggota Komite Provinsi Guangdong ke-12 dari CCPPCC.

Kewarganegaraan kedua tidak diizinkan berdasarkan hukum Tiongkok dan dapat mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan Tiongkok secara otomatis.”

Jika tidak ada yang lain, *The Cyprus Papers* mengungkapkan apa yang sudah kita ketahui kapital selalu menghasilkan kelebihan. Terkadang kelebihan paspor: beberapa mampu untuk memiliki banyak, dan beberapa seperti pekerja migran tidak berdokumen tidak mampu untuk memiliki paspor, tinggal di pinggir negara yang berbahaya. Kapital selalu dalam keadaan berkelebihan, dengan akumulasi kekayaan, yang terkadang dialihkan ke proyek infrastruktur, pembangunan negara dan situs reklamasi, serta terkadang juga tersedot ke lingkaran korupsi. Kapital menghasilkan lingkaran infrastruktur (dan bergabung dengan lingkaran korupsi) dari kesepakatan tanah dan paspor yang bergerak cepat tanpa investasi nyata dalam kewarganegaraan. Faktanya, korupsi berkembang pesat ketika logistik dan lingkarannya terlibat. Tanpa sejarah korupsi yang dipertanggungjawabkan, kisah Forest City hanyalah salah satu “rahasia umum” elite Malaysia, Singapura, Johor, dan ASEAN-Tionghoa. Kadang-kadang penduduk setempat campur tangan dan memperluas situs untuk kepentingan nonmanusia, rumput laut, bakau, dan pendangkalan. Namun, bagi korupsi, yang selalu beroperasi sebagai pencilan, artinya bisa lebih luas dari sekadar wujud fisik Forest City itu sendiri. Korupsi yang hadir sampai ke lanskap sepanjang Pantai Siprus, tumbuh subur di samping pohon palem tropis Iskandar Malaysia, berkeliling dari satu tempat ke tempat lain. Kapital dan korupsi selalu berkembang, menelan segala sesuatu yang menyentuh jalannya. Bahkan hutan pun bernasib serupa.

5. Setelah Status:

Forest City diciptakan di sini, sebuah wilayah yang diberi label sebagai *Special Exceptional Zones* (SEZ) atau ‘Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)’. Kedengarannya hiperbolik, tetapi KEK benar-benar luar biasa. Mereka sering melewati semua protokol semua negara, dan kerasnya perencanaan, mereka adalah kaum Leviathan yang berdiri sendiri. Berdaulat membuat aturan mereka sendiri. KEK adalah ruang perpanjangan negara (bukan ruang untuk emansipasi romantis), ruang di mana sejarah pemangsaan ditempa. Negara mereproduksi dirinya sendiri pada tepi-tepi

14
Sudipto Basu,
“On the Ends of
the Network as a
Zone of Friction
(And Extraction),”
APRJA, Vol. 9: 1,
2020 ([https://
aprja.net/article/
view/121486](https://aprja.net/article/view/121486)).

ini, titik di mana tubuh—manusia, nonmanusia—dan lainnya menjadi **penetapan**. KEK adalah antarmuka, yang terletak di luar negara bagian yang dibawa ke dalam lipatan, dari tenaga kerja ke pasir, ke ikan dan pelabuhan—dan mereka yang berada di bagian dalam negara, yang justru didorong semakin jauh ke luar.¹⁴ Luapan kapital dari Foshan ke Nicosia ke Johor, dan seterusnya menjadi penetapan, atau ditentukan, dalam proses itu. “Penetapan” terjadi bukan hanya dalam pembangunan perbatasan, atau dalam kemampuan mereka untuk menghasilkan pengecualian (seperti di lepas pantai, tempat kapital ini diproses), melainkan juga dalam kekusutan infrastruktur yang memproduksinya.

Kini sudah menjadi kisah usang untuk berbicara tentang mayat pekerja migran Asia Selatan yang tak terhitung banyaknya, sebagian besar tanpa nama, yang secara permanen tergelincir dari tanggungan negara. Sudah cukup banyak profesi—LSM, aktor negara, bahkan seniman yang menjajakan bentuk baru pornomiseria—menunggangi isu para migran ini, dalam logika memungut kelebihan capital yang berserakan. Hubungan khusus Malaysia dengan badan-badan ini menunjukkan perlunya badan yang *tidak ditetapkan* dalam reproduksi negara dalam negara, ditopang oleh infrastruktur pelayaran laut yang penuh risiko, penyeberangan perbatasan yang tidak dapat dilintasi, keringat di dalam dinding lembab, paspor palsu, dan dokumen palsu.

Untuk memahami arti dari membangun kota di atas hutan, kita harus mengungkap keberagaman lapisan di mana *penetapan* terjadi. Neokolonialisme dengan nama lain, tentunya. Infrastruktur ekstraktif yang menegaskan sekaligus menyangkal negara. *Belt and Road Initiative* dengan demikian menjadi kondisi yang ganjil di mana intrik negara secara bersamaan diperpanjang dan disangkal; sebuah program yang membutuhkan pemeriksaan ulang atas cara-caranya dalam membingkai kedaulatan, kewarganegaraan, dan kategori kepemilikan, baik di seluruh dunia manusia dan nonmanusia.

Bio Penulis

The Forest Curriculum (Bangkok/Yogyakarta/Manila/Seoul/Berlin/Santa Barbara) adalah platform keliling dan nomaden untuk penelitian interdisipliner dan pembelajaran bersama, berbasis di Asia Tenggara, dan beroperasi secara internasional. Didirikan dan disutradarai oleh kurator Abhijan Toto dan Pujita Guha, dan dengan Rosalia Namsai Engchuan, ia bekerja dengan seniman, kolektif, peneliti, organisasi dan pemikir adat, musisi, dan aktivis, untuk mengumpulkan kritik yang terletak pada Antroposen melalui budaya alam Zomia, sabuk hutan yang menghubungkan Asia Selatan dan Tenggara. *The Forest Curriculum* menyelenggarakan pameran, program publik, pertunjukan, video dan proyek multimedia, serta kegiatan intensif tahunan di lokasi berbeda di seluruh wilayah, yang mengumpulkan praktisi dari seluruh dunia untuk terlibat dalam penelitian kolektif dan metodologi bersama: *The Forest And The School*, Bangkok (2019); *The Forest Is In The City Is In The Forest I*, Manila (2020) and *II*, Online (2020-2021). Platform ini bekerja sama dengan institusi dan organisasi internasional, termasuk Savvy Contemporary, Berlin; Ideas City, the New Museum, NTU CCA, Singapura, Nomina Nuda, Los Baños, dan GAMEc, Bergamo.

Organized by



Co-funded by



SAM | Fund for Arts and Ecology



Supported by

